

## Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung

Rina Hermawati, Caroline Paskarina, Nunung Runiawati

Universitas Padjadjaran

[rina.antrop@gmail.com](mailto:rina.antrop@gmail.com)

### Abstract

As a city that has a characteristic of social heterogeneity, Bandung has the potential of conflict originated from the diversity of identities. One of the sources of conflict which are susceptible to emerge is the conflict originating in differences in religions. This article attempts to study tolerance in relations among religions in Bandung, which is measured by to which extent the adherents of religions determine their social distance towards other adherents of religions. By using the qualitative method, we measured the value of tolerance index through three main dimensions, namely perception, attitude and cooperation among religious people. The research result showed that the Tolerance Index among religious people in Bandung City is 3.82, which is categorized as "High", indicating that social interaction among religious people in Bandung City has persisted well within normal boundaries of social distance. The possibility of conflict is generally triggered by the building permit of houses of worship which is within the government's domain of authority; therefore it is urgent to be reformed in order to increase the Tolerance Index in Bandung.

Keywords: tolerance, religion, index of tolerance

### Abstrak

Sebagai kota yang memiliki ciri keanekaragaman secara sosial, Bandung menyimpan potensi konflik yang bersumber dari keberagaman identitas tersebut. Salahsatu sumber konflik yang rentan muncul di tengah-tengah masyarakat yang beragam adalah konflik yang bersumber dari perbedaan agama. Artikel ini berupaya mengkaji toleransi dalam hubungan antarumat beragama di Kota Bandung yang diukur melalui seberapa jauh para pemeluk agama menentukan jarak sosial mereka terhadap para pemeluk agama lainnya. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penulis mengukur nilai indeks toleransi melalui tiga dimensi utama yaitu persepsi, sikap dan kerjasama antar umat beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Toleransi antarumat Beragama di Kota Bandung sebesar 3,82 termasuk dalam kategori "Tinggi", yang mengindikasikan bahwa interaksi sosial antarumat beragama di Kota Bandung telah berlangsung secara baik dan berada dalam batas-batas jarak sosial yang wajar. Kemungkinan konflik umumnya dipicu oleh perizinan pembangunan rumah ibadat yang berada dalam ranah kewenangan pemerintah, sehingga hal ini penting untuk dibenahi dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Toleransi di Kota Bandung.

Kata-kata kunci: toleransi, umat beragama, indeks toleransi

### Latar Belakang Penelitian

Tulisan ini membahas tentang tingkat toleransi antar umat beragama di kalangan masyarakat perkotaan yang memiliki karakter sosial dan budaya yang beragam. Seperti juga kota-kota lainnya, Bandung memiliki ciri heterogenitas secara sosial.

Dalam kedudukannya sebagai pusat pemerintahan di Jawa Barat, juga kota pendidikan, dan kota wisata, kehadiran para pendatang, baik dari daerah-daerah lain di Indonesia maupun dari luar negeri, tidak dapat dihindari. Tidak sedikit dari kalangan pendatang tersebut yang kemudian menjadi penduduk Kota Bandung, sehingga

komposisi penduduk Kota Bandung makin beragam. Keberagaman ini di satu sisi menjadi potensi yang menambah daya tarik Kota Bandung, tapi di sisi lain, juga menyimpan potensi konflik yang bersumber dari keberagaman identitas tersebut.

Bandung sebagai kota yang majemuk bukan baru terbentuk saat ini, tetapi telah melalui proses sejarah yang panjang. Dalam tulisannya, Budi Radjab (2006) menguraikan terbentuknya keberagaman di Kota Bandung sejak lebih dari seabad lampau. Keberagaman itu dibentuk oleh berbagai suku bangsa yang bermukim di Kota Bandung, seperti yang berasal dari Jawa, Batak, Minangkabau, Minahasa, Ambon, Cina, Belanda, dan orang Sunda yang terlebih dahulu mendiami wilayah Kota Bandung. Keberagaman suku bangsa yang mendiami Kota Bandung semakin bertambah ketika Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah lanjutan tingkat atas dan perguruan tinggi di awal abad ke-20, yang mengundang kehadiran banyak orang dari suku bangsa dan daerah lain ke Kota Bandung untuk menempuh pendidikan dan akhirnya menetap (Radjab, 2006).

Kendati jumlah etnik Sunda secara umum identik sebagai penduduk asli di wilayah Bandung, tetapi dominasi etnik ini secara kultural berubah secara dinamis. Pada awal tahun 1970-an, studi yang dilakukan Bruner (dalam Radjab, 2006) menemukan bahwa etnik Sunda masih relatif mendominasi, termasuk dalam hal kebudayaan, antara lain dalam hal penggunaan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari. Tetapi, dominasi ini mengalami perubahan seiring pertumbuhan Kota Bandung, baik dari sisi kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, dan berkembangnya sarana pendidikan (Radjab, 2006).

Masyarakat yang beragam secara inheren telah mengandung resiko konflik di antara kelompok-kelompok yang berbeda, baik

secara etnisitas maupun faktor perbedaan lainnya. Salah satu sumber konflik yang rentan muncul di tengah-tengah masyarakat yang beragam adalah konflik yang bersumber dari perbedaan agama. Studi yang dilakukan *Centre of Strategic and International Studies* (CSIS) pada tahun 2012, menyatakan bahwa toleransi beragama orang Indonesia tergolong rendah. Dalam survei CSIS, sebanyak 59,5 persen responden tidak berkeberatan bertetangga dengan orang beragama lain. Sekitar 33,7 persen lainnya menjawab sebaliknya. Penelitian ini dilakukan pada Februari 2012 di 23 provinsi dan melibatkan 2.213 responden. Saat ditanya soal pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungannya, sebanyak 68,2 persen responden menyatakan lebih baik hal itu tidak dilakukan. Hanya 22,1 persen yang tidak berkeberatan. Hasil survei juga menunjukkan kecenderungan intoleransi ada pada kelompok masyarakat dalam semua kategori pendidikan. Sekitar 20 persen masyarakat berpendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, menyatakan tak keberatan dengan pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungannya. Adapun pada masyarakat dengan pendidikan di atas SMA, hanya sekitar 38,1 persen yang menyatakan setuju. Data ini menunjukkan bahwa ternyata tingkat toleransi beragama tidak berkorelasi langsung dengan tingkat pendidikan formal seseorang. Di sisi lain, temuan survei CSIS ini juga menguatkan dugaan bahwa praktik demokrasi, khususnya yang terkait dengan pluralitas dan perlindungan negara akan kebebasan beragama, masih perlu ditingkatkan.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI - dalam tahun 2009 - melakukan penelitian berkaitan dengan kerukunan ini di daerah Jawa Barat. Penelitian yang sama dilakukan pula di Jawa Timur (2010) dan Lampung (2011). Hasil yang didapat dari penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang

dilakukan sebelumnya di Jawa Barat. Kesimpulannya adalah ditemukannya variasi tingkat kerukunan di berbagai wilayah kabupaten di Jawa Barat dan Lampung mulai dari yang “tidak rukun” sampai pada yang “harmonis”. Untuk lebih mempertajam penelitian kerukunan dan mendapatkan indeks kerukunan bagi seluruh daerah di Indonesia, Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada tahun 2012 berusaha memperlebar penelitian masalah kerukunan dengan menjadikan seluruh provinsi sebagai lokasi penelitian. Dengan pengambilan lokasi sampel sebanyak ini diharapkan survei dapat merepresentasikan jawaban atau sikap seluruh masyarakat beragama dalam hal hubungan mereka dengan pemeluk agama lainnya. Survei yang melibatkan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan ini hasilnya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih toleran, dengan indeks terendah 3.1 (cukup toleran) hingga 4.2 (sangat toleran).

Survei nasional ini kembali dilakukan pada tahun 2013 yang hasilnya menemukan bahwa kerukunan antarumat beragama sudah berada pada level baik. Nilai ini didasarkan pada pencapaian skor untuk indikator-indikator kerukunan beragama yang tergolong tinggi, yakni untuk “persepsi tentang kerukunan beragama” diperoleh skor rata-rata 75,2; “sikap dan interaksi antarumat beragama” memiliki skor rata-rata 71,9; dan “kerjasama antarumat beragama” diperoleh skor rata-rata 72. Sedangkan rata-rata total skor (dalam skala 5) untuk survei tentang persepsi tentang kerukunan beragama diperoleh skor rata-rata 3,8; sikap dan tindakan antarumat beragama diperoleh rata-rata 3,6; dan kerjasama antarumat beragama diperoleh rata-rata 3,6.

Kemudian, untuk variabel persepsi tentang kerukunan beragama diperoleh rata-rata total skor 3,8 dengan rata-rata terendah 3,3 dan rata-rata tertinggi 4,3. Rata-rata terendah

terdapat di Provinsi DKI Jakarta dan Jambi. Sedangkan rata-rata tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan untuk variabel sikap dan interaksi antarumat beragama diperoleh rata-rata total skor 3,6 dengan rata-rata terendah 2,9 dan rata-rata tertinggi 4,3. Rata-rata terendah terdapat di Provinsi Jambi. Sedangkan rata-rata tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara. Untuk variabel kerjasama antarumat beragama diperoleh rata-rata total skor 3,6 dengan rata-rata terendah 3 dan rata-rata tertinggi 4,4. Rata-rata terendah terdapat di Provinsi Jambi. Sedangkan rata-rata tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan (dari ketiga variabel yang diteliti) ternyata Jambi memiliki rata-rata terendah dan Sulawesi Utara memiliki rata-rata tertinggi.

Survei nasional yang dilakukan Kementerian Agama RI di atas menunjukkan temuan yang relatif lebih moderat ketimbang studi-studi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di luar pemerintah. Perbedaan temuan ini perlu disikapi dengan bijak, bukan dengan mempersoalkan keabsahan temuan yang dihasilkan, tapi dengan memaknai temuan tersebut sebagai indikasi bahwa masih terdapat potensi konflik dalam hubungan antar umat beragama yang perlu segera ditangani.

Berbagai studi yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama, termasuk sikap toleransi yang menjadi indikator dari kerukunan tersebut, masih menjadi persoalan bagi bangsa Indonesia. Tingkat toleransi di berbagai daerah pun beragam, sehingga penanganan persoalan tersebut tidak dapat diseragamkan. Dalam konteks Kota Bandung, data yang ada tidak memunculkan banyak kasus intoleransi yang terjadi di Kota Bandung. Meskipun demikian, mengingat karakteristik penduduk yang sangat

beragam, persoalan toleransi ini tetap perlu ditangani agar potensi konflik yang mungkin muncul dapat dicegah.

### Kerangka Konseptual

Studi tentang toleransi telah banyak dilakukan, salahsatunya yang lazim digunakan sebagai model penelitian kuantitatif tentang toleransi adalah yang dilakukan oleh Bogardus pada tahun 1925. Studi ini kemudian direplikasi pada tahun 1946, 1956, 1966, dan 2005. Fokus kajiannya adalah pada pengukuran sejauh mana penerimaan seseorang terhadap orang lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda dengan dirinya. Konsep Bogardus ini kemudian populer dengan sebutan *Social Distance Scale* yang kemudian banyak digunakan sebagai alat ukur toleransi sosial. Bogardus mendefinisikan jarak sosial (*social distance*) sebagai *function of affective distance between the members of two groups: [i]n social distance studies the center of attention is on the feeling reactions of persons toward other persons and toward groups of people* (Bogardus, 1947). Dalam konsep ini, jarak sosial pada dasarnya diukur dari seberapa besar simpati yang dirasakan individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain yang berbeda dengan dirinya.

Secara rinci, pengukuran tersebut dioperasionalkan ke dalam skala yang mencakup rentang skor dari 1,00 hingga 7,00, di mana skor 1,00 berarti tidak ada jarak sosial. Skala yang dipakai Bogardus sebagai berikut:

*As close relatives by marriage (i.e., as the legal spouse of a close relative) (score 1.00)*

*As my close personal friends (2.00)*

*As neighbors on the same street (3.00)*

*As co-workers in the same occupation (4.00)*

*As citizens in my country (5.00)*

*As non-citizen visitors in my country (6.00)*

*Would exclude from entry into my country (7.00)*  
(Bogardus, 1925).

Konsep Bogardus tidak secara khusus membahas tentang toleransi sosial ataupun toleransi antarumat beragama. Terdapat beberapa kelemahan ketika hal tersebut dipakai untuk melihat keintiman atau kedekatan hubungan sosial antara pemeluk yang berbeda agama di suatu negara. Tingkatan hubungan yang dikonsepsikan Bogardus tidak selamanya bisa dilihat berjenjang seperti itu, mengingat dua variabel jenjang yang ada, misalnya, bisa saja memperlihatkan keintiman atau jarak sosial yang sama dalam praktek kehidupan masyarakat. Selain itu, terdapat juga variabel antara (*intervening variables*) yang ikut berpengaruh terhadap pilihan hubungan yang dilakukan seseorang.

Definisi toleransi beragama (*religious tolerance*) tidak mudah ditemukan secara eksplisit. Sebagian besar studi tentang toleransi beragama lebih banyak mendeskripsikan sikap yang disebut toleran. Powell dan Clarke (2002) menyatakan bahwa *an attitude of tolerance is only possible when some action or practice is objectionable to us, but we have overriding reasons to allow that action or practice to take place*. Dalam pernyataan tersebut, tersirat bahwa toleransi adalah pengecualian (*exception*) atas hal-hal yang sebenarnya tidak disukai, tapi tetap dibiarkan dilakukan. Definisi lain dikemukakan oleh Andrew Cohen (2004: 69), yang menyatakan bahwa *an act of toleration is an agent's intentional and principled refraining from interfering with an opposed other (or their behaviour, etc.) in situations of diversity, where the agent believes she has the power to interfere*. Dalam definisi tersebut, toleransi diartikan sebagai sikap untuk tidak mencampuri atau mengintervensi urusan atau perilaku pihak lainnya.

Dalam konteks hubungan antarumat beragama, intoleransi muncul ketika ada prasangka terhadap orang atau kelompok lain yang berada di luar dirinya. Gordon Allport (1954) menyebutkan tentang paradoks agama dan intoleransi. Menurutnya, agama turut bertanggung jawab atas munculnya prasangka. Kendati ada aspek universal dari setiap agama, tapi ketika ikatan-ikatan keagamaan itu terbentuk, maka perasaan *in group* akan muncul dan menyebabkan setiap orang yang berada di luar ikatan tersebut dianggap sebagai *out group* dan diperlakukan berbeda, bahkan tidak jarang dicurigai akan mengganggu ketahanan ikatan tersebut. Dalam konteks inilah, konflik dan perilaku kekerasan yang mengatasnamakan agama menjadi rentan muncul.

Konflik keagamaan yang diawali oleh keadaan yang tidak rukun antarpara pemeluk agama yang berbeda muncul karena adanya beberapa faktor penyebab. Ahmad (2013) menjelaskan keterkaitan berbagai faktor ini dengan konflik atau keadaan tidak rukun ke dalam variabel-variabel berikut:

1. Variabel Norma dan Ajaran.

Ajaran yang ada yang mempengaruhi tingkah laku dan tindakan seorang Muslim berasal dari al Quran dan hadits (mungkin juga *ijma*). Ajaran ini diinterpretasi dan diinternalisasi. Karena ajaran yang ada sangat bersifat umum, hal ini memungkinkan munculnya berbagai interpretasi. Hal ini juga dimungkinkan karena setiap anggota masyarakat Muslim mengalami sosialisasi primer yang berbeda, di samping pengalaman, pendidikan dan tingkatan ekonomi yang juga tidak sama. Dari hasil interpretasi ini muncullah apa yang diidealkan berkaitan dengan kehidupan masyarakat Islam (*baladun thoyyibatun wa robbun ghofur*). Termasuk dalam hal ini adalah pengakuan bahwa interpretasinya adalah yang paling

benar, sehingga menafikan interpretasi kalangan lain, seperti terlihat dalam gerakan purifikasi. Dalam agama lain, hal seperti ini juga bisa terjadi, dengan situasi dan faktor penyebab yang mungkin sama.

2. Variabel Pemahaman.

Pemahaman adalah kelanjutan dari penafsiran terhadap ajaran. Dalam kasus masyarakat Islam diasumsikan bahwa di sana ada beberapa paham umum yang muncul setelah masyarakat menafsirkan ajaran Islam. Pemahaman ini merupakan penerapan *manhaj* tertentu dalam menafsirkan teks al Quran maupun hadits. Karena pemahaman bisa berbeda, tindakan atau sikap dalam hubungannya dengan agama lain juga bisa berbeda. Variabel pemahaman ini bisa saja diwarnai oleh perbedaan yang mencolok antara satu daerah dari daerah lainnya.

3. Variabel Sikap.

Variabel ini muncul ketika variabel kedua dihadapkan dengan kondisi sosial nyata dalam masyarakat. Hal ini termasuk di dalamnya adalah faktor-faktor domestik dan internasional. Hegemoni politik oleh negara atau represi yang dilakukan oleh kelompok apapun terhadap umat Islam akan melahirkan respon yang berbeda dari berbagai kelompok yang ada. Meskipun demikian, sejauh ancaman hegemoni tadi menyangkut kedirian Islam sebagai agama atau umat Islam sebagai masyarakat, maka respon kalangan Islam akan sama, karena mereka juga terikat oleh ajaran bahwa "sebagai sesama umat Islam, mereka adalah bersaudara".

4. Variabel Persepsi.

Persepsi adalah penilaian yang dalam hal ini terhadap kelompok agama lain, baik mengenai gambaran umumnya, masyarakatnya ataupun apa yang dilakukan oleh masyarakat agama lain bersangkutan. Konflik-konflik yang muncul antara pemeluk suatu agama

dengan pemeluk agama lainnya bisa berasal dari adanya persepsi yang keliru atau pandangan jelek terhadap agama lain dan pemeluknya. Persepsi ini muncul setelah mereka melihat dan memberikan penilaian terhadap kelompok agama lain tersebut yang dianggapnya merugikan agama atau kelompok mereka. Dengan demikian pemahaman terhadap variabel ini menjadi penting mengingat hal ini akan memberikan gambaran kenapa hubungan sosial antarpemeluk agama memanas dan kenapa suatu konflik terjadi.

Penelitian ini memahami toleransi dalam hubungan antarumat beragama sebagai masalah kerukunan antarumat beragama. Karena itu, variabel toleransi kemudian dioperasionalkan ke dalam 3 (tiga) indikator, yakni persepsi, sikap, dan kerjasama. Persepsi, yakni aspek kehidupan yang masuk dalam wilayah penilaian para pemeluk agama dalam kaitannya dengan pemeluk agama lainnya. Dalam tindakan sosial atau sikap yang muncul, persepsi atau penilaian biasanya mendahului tindakan tersebut. Dengan kata lain, persepsi biasanya mendorong lahirnya sikap atau bahkan tindakan. Persepsi terhadap pemeluk agama lain juga dipengaruhi oleh norma atau *world view* yang dipunyai oleh para pemeluk agama bersangkutan. Sikap, yakni pendirian yang diperlihatkan oleh para pemeluk agama yang berupa respon terhadap pemeluk agama lainnya. Aspek ini akan menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh pemeluk agama sehubungan dengan hadirnya fakta sosial di hadapan mereka. Sikap yang dimaksud di sini bisa berupa tindakan, tetapi bisa juga berupa tindakan “diam”. Tetapi dalam penelitian ini sikap akan diungkapkan melalui pernyataan-pernyataan. Kerjasama, yakni aspek hubungan sosial antara para pemeluk agama yang berbeda. Persepsi atau penilaian selain bisa mendorong lahirnya sikap juga bisa

melahirkan tindakan-tindakan kerjasama. Jadi kalau sikap lebih merupakan tindakan ke dalam dalam artian belum melahirkan tindakan nyata berkaitan dengan hubungan mereka dengan pemeluk agama lain, kerjasama adalah realitas hubungan sosial. Kerjasama dalam hal ini bisa diperlihatkan, misalnya, dalam tindakan gotong royong untuk kepentingan bersama atau saling menolong.

### Metode Penelitian

Pengumpulan data mengenai toleransi antarumat beragama ini dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Dengan cara ini diharapkan bisa tergambar generalisasi pola hubungan antarumat beragama yang ada. Hubungan yang dimaksud berkaitan dengan tingkat keintiman (*intimacy*) atau bahkan sebaliknya kebencian yang menyertainya. Dengan kata lain, toleransi dalam hubungan antarumat beragama ini akan diukur melalui seberapa jauh para pemeluk agama menentukan jarak sosial mereka terhadap para pemeluk agama lainnya. Selain mengukur jarak sosial yang mencerminkan toleransi umat beragama di Kota Bandung, penelitian ini juga menambahkan variabel sikap pemerintah dan harapan masyarakat terhadap pemerintah sebagai dua variabel yang dinilai penting untuk mengetahui seberapa besar persepsi dan harapan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam memelihara kondisi kerukunan antarumat beragama. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan formal untuk mengatur hubungan-hubungan sosial, termasuk di dalamnya hubungan antarumat beragama, menjadi aktor yang berperan strategis untuk mendukung terciptanya toleransi yang kondusif.

Kelima dimensi yang menjadi fokus survei ini, yaitu “persepsi”, “sikap” “kerjasama”, “sikap pemerintah”, dan “harapan terhadap pemerintah”, dijelaskan melalui beberapa indikator yang dirumuskan melalui item-item pertanyaan dalam kuesioner. Indikator

yang memperlihatkan lima dimensi di atas diberi bobot, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dalam jawaban pada kuesioner, para responden diminta untuk memilih salah satu dari 5 jawaban, yakni Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Jawaban tersebut diberi skor, yakni 5 untuk SS, 4 untuk S, 3 untuk N, 2 untuk TS, dan 1 untuk STS. Kelima jawaban yang ada tentu saja tidak memperlihatkan arti apa-apa bagi responden selain bahwa mereka diminta untuk memilih satu saja jawaban yang dirasa sesuai dengan pandangan, pendapat dan persepsi mereka. Skor jawaban tersebut mengindikasikan potensi kerukunan pada diri para responden. Pembobotan ini, yang tentunya hanya diketahui oleh para peneliti, dijadikan alat ukur berkaitan dengan tingkat kerukunan, di mana jawaban berbobot 5 adalah menunjuk pada tingkat kerukunan yang tinggi. Penomoran ini menjadi penting mengingat jawaban dalam kuesioner tidak berformat sama, melainkan tergantung pada pertanyaannya. Dalam kuesioner terdapat pertanyaan yang memerlukan jawaban “sangat setuju” sampai “sangat tidak setuju”, pembobotan jawaban seperti ini merujuk pada skala Likert yang lazim digunakan dalam penelitian survei. Pembobotan jawaban dalam skala Likert pada umumnya berjumlah ganjil: 3, 5, 7 dan seterusnya. Dalam penelitian ini ditetapkan 5 variasi, artinya 1 – 5, yang dianggap sudah cukup untuk mengakomodasi semua variasi jawaban yang diberikan para responden.

Penentuan sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini menggunakan teknik area *sampling* berdasarkan kecamatan di Kota Bandung, sehingga diharapkan data yang terkumpul dapat mewakili kondisi dari setiap kecamatan.

Pengolahan dan analisis data kuantitatif diolah dengan menggunakan program statistik SPSS. Jawaban-jawaban responden yang diperoleh melalui kuesioner pertama-

tama diolah untuk mendapatkan tabel frekuensi dan persentase dari setiap jawaban pertanyaan. Secara bersamaan juga bisa diperoleh nilai skor rata-rata berupa mean dan median dari setiap variabel. Untuk dapat memperoleh indeks skor dari beberapa variabel yang menanyakan tentang (1) persepsi; (2) sikap; (3) kerjasama; (4) sikap terhadap pemerintah; dan (5) harapan terhadap pemerintah, yang masing-masing digabung menjadi variabel komposit. Karena jawaban-jawab terhadap pertanyaan dibobotkan dari yang tertinggi sampai yang terendah (1-5), Skor variabel komposit inilah yang digunakan sebagai barometer yang menunjukkan tingkatan toleransi dalam hubungan antarumat beragama di Kota Bandung.

Dengan menggunakan hasil penghitungan skor tersebut, disusun indeks penilaian dari setiap variabel dan indeks keseluruhan yang mencerminkan tingkat toleransi umat beragama di Kota Bandung. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks tersebut adalah:

a. *Menghitung indeks*

$$\text{Indeks} = \frac{(\sum \text{Frekuensi} \times \text{Skor})}{\sum \text{Frekuensi}}$$

b. *Menghitung jarak interval*

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{(\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah})}{5} \\ &= \frac{(5-1)}{5} \\ &= 0,8 \end{aligned}$$

Nilai Indeks:

1 - 1.7	=	Sangat rendah
1.8 - 2.5	=	Rendah
2.6 - 3.3	=	Cukup
3.4 - 4.1	=	Tinggi
4.2 - 5	=	Sangat tinggi

Hasil penghitungan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menginterpretasikan nilai indeks. Dalam interpretasi tersebut, juga digunakan hasil pengolahan data secara deskriptif.

## Hasil Penelitian

### Persepsi tentang Toleransi

Persepsi adalah penilaian yang dalam hal ini terhadap kelompok agama lain, baik mengenai gambaran umumnya, masyarakatnya ataupun apa yang dilakukan oleh masyarakat agama lain bersangkutan. Konflik-konflik yang muncul antara pemeluk suatu agama dengan pemeluk agama lainnya bisa berasal dari adanya persepsi yang keliru atau pandangan jelek terhadap agama lain dan pemeluknya. Persepsi ini muncul setelah mereka melihat dan memberikan penilaian terhadap kelompok agama lain tersebut yang dianggapnya merugikan agama atau kelompok mereka. Dengan demikian pemahaman terhadap variabel ini menjadi penting mengingat hal ini akan memberikan gambaran kenapa hubungan sosial antarpemeluk agama memanas dan kenapa suatu konflik terjadi.

Dalam tindakan sosial atau sikap yang muncul, persepsi atau penilaian biasanya mendahului tindakan tersebut. Dengan kata lain, persepsi biasanya mendorong lahirnya sikap atau bahkan tindakan. Persepsi terhadap pemeluk agama lain juga dipengaruhi oleh norma atau *world view* yang dimiliki oleh para pemeluk agama bersangkutan. Persepsi ini diukur dari sejumlah hal, antara lain: pemenuhan hak-hak keberagaman, pemenuhan kewajiban dalam hubungan antarumat beragama, penilaian terhadap keberagaman, penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemeluk agama yang berbeda, serta konflik yang berpeluang terjadi atau pernah dialami oleh responden dalam interaksinya dengan pemeluk agama lain.

Berdasarkan data yang diperoleh, diperoleh temuan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan terkait dengan toleransi antarumat beragama. Hal ini tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Persepsi Responden tentang Toleransi Antarumat Beragama di Kota Bandung

Persepsi	Jawaban (%)				
	SS	S	N	TS	STS
Memeluk agama merupakan bagian dari hak asasi manusia	56,5	39,4	3,7	0,5	
Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing merupakan bagian dari hak asasi manusia	56	40,3	3,7		
Setiap pemeluk agama wajib menjamin kebebasan pemeluk agama lainnya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing	52,8	44,4	2,3	0,5	
Setiap pemeluk agama wajib menjamin kebebasan pemeluk agama lainnya untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing	50,5	45,8	3,2	0,5	
Perbedaan agama merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat	50,9	45,4	2,8	0,9	

Persepsi	Jawaban (%)				
	SS	S	N	TS	STS
Agama yang saya anut mengajarkan saya untuk bersikap toleran atau menghargai agama lain	50,9	46,3	2,3	0,5	
Penyebaran agama kepada penganut agama lain tidak diperbolehkan	23,1	29,6	25	19,4	2,8
Pemeluk agama yang baik tidak akan melakukan kekerasan secara fisik terhadap pemeluk agama lainnya	48,1	46,8	3,2	1,4	0,5
Pemeluk agama yang baik tidak akan melakukan kekerasan secara verbal terhadap pemeluk agama lainnya	48,1	48,1	2,3	1,4	
Kegiatan radikalisme (kekerasan) dilarang dalam agama yang saya anut	46,8	48,6	4,6		
Di lingkungan tempat tinggal saya pernah terjadi konflik antar umat bergama	5,6	10,6	14,4	50,5	19
Konflik antar umat beragama disebabkan karena kepentingan politik	13,9	36,1	26,9	20,8	2,3
Konflik antar umat beragama	18,1	30,1	26,9	22,2	2,8

Persepsi	Jawaban (%)				
	SS	S	N	TS	STS
disebabkan karena kepentingan ekonomi					
Konflik antar umat beragama disebabkan karena egoisme masing-masing pemeluk agama	34,3	35,6	19,9	9,3	0,9
Kerjasama antar umat beragama sudah terjalin dengan baik	14,4	56,9	16,2	9,7	2,8
Para tokoh agama sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama	14,8	51,4	19	13,4	1,4
Organisasi keagamaan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama	14,8	53,2	17,6	13	1,4
Pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama	14,4	50,9	15,7	16,2	2,8

Sumber: Hasil Penelitian, diolah, 2015

Kendati ada item pernyataan yang dijawab "Tidak Setuju" oleh mayoritas responden,

tapi jawaban ini bermakna positif karena menyangkut konflik dengan pemeluk agama lain yang pernah dialami oleh responden di lingkungan tempat tinggalnya. Jawaban responden yang menyatakan 'tidak' mengandung arti bahwa konflik tidak pernah dialami responden. Sebanyak 16,2% responden menjawab dalam kategori pernah mengalami konflik, yakni "Sangat Setuju" (5,6%) dan "Setuju" (10,6%). Berdasarkan wawancara dengan responden yang menjawab pernah mengalami konflik di lingkungannya, alasan yang menyebabkan konflik timbul adalah: (1) sebanyak 2,4% menjawab karena penolakan pembangunan tempat ibadah agama lain (dalam hal ini gereja), kemudian 0,5% responden menyebutkan penyebab konflik adalah karena tetangga yang beragama berbeda membuka usaha di rumahnya tetapi tanpa izin dari lingkungan setempat, dan sebanyak 0,5% responden lain menyebutkan konflik muncul karena ada bangunan mesjid di lingkungannya yang dibangun dengan arsitektur Cina, sehingga dianggap kurang Islami. Alasan-alasan tersebut menegaskan bahwa pemicu konflik antarumat beragama bersumber dari pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungan sekitar penduduk.

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun persepsi sebagian besar responden tergolong positif terhadap keberagaman agama, tetapi ketika dikaitkan dengan keberadaan rumah ibadah di lingkungan permukiman, masih ada responden yang mempersepsinya sebagai hal yang tidak seharusnya dilakukan. Hal ini bermakna bahwa persepsi toleransi beragama cenderung positif jika perbedaan agama itu masih berada dalam jarak sosial yang tidak terlampaui dekat dengan kehidupan sehari-hari responden. Sebaliknya, ketika aktivitas pemeluk agama lain tersebut dinilai sudah memasuki ranah kehidupan sehari-hari, misalnya dengan menyelenggarakan kegiatan ibadah di sekitar lingkungan permukiman, maka persepsi toleransi mengalami pergeseran ke arah kecenderungan penolakan.

## Sikap tentang Toleransi

Sikap, yakni pendirian yang diperlihatkan oleh para pemeluk agama yang berupa respon terhadap pemeluk agama lainnya. Aspek ini akan menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh pemeluk agama sehubungan dengan hadirnya fakta sosial di hadapan mereka. Dalam penelitian ini, sikap mayoritas responden menunjukkan bahwa mereka relatif terbuka dalam berinteraksi sosial dengan umat yang berbeda agama. Hal ini tampak dari data berikut ini yang menggambarkan sikap responden dalam relasi sosial dengan umat beragama lain.

Tabel 2 Sikap terhadap Toleransi

Sikap	Jawaban (%)				
	S S	S	N	TS	ST S
Saya bersedia bertetangga dengan pemeluk agama lain	48,1	44,9	5,6	1,4	
Saya bersedia bergaul (menyapa, mengobrol dll) dengan pemeluk agama lain	48,6	46,3	4,2	0,9	
Saya bersedia bersahabat dengan pemeluk agama lain	42,1	46,8	8,8	1,4	0,9
Saya bersedia menikah dengan pemeluk agama lain	11,1	10,2	18,5	29,6	30,6
Dalam melakukan hubungan sosial, saya tidak pernah membedakan seseorang berdasarkan agamanya	29,6	58,3	9,3	2,8	
Saya tidak keberatan apabila pemeluk agama lain membangun tempat peribadatnya di lingkungan tempat tinggal saya	22,7	34,7	19,9	22,7	
Saya tidak keberatan apabila	23,6	39,4	17,6	18,1	1,4

Sikap	Jawaban (%)				
	S	S	N	TS	ST
pemeluk agama lain mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal saya					
Saya pernah berselisih paham dengan pemeluk agama lain	4,2	13	9,3	46,8	26,9
Saya bersedia untuk bermusyawarah/berdamai dengan pemeluk agama lain jika terjadi perselisihan.	24,1	62,5	11,1	1,9	0,5
Keberadaan ajaran agama lain diluar yang sudah ditetapkan oleh negara meresahkan	20,4	38	25,9	9,7	6

Sumber: Hasil Penelitian, diolah, 2015

Data di atas menunjukkan bahwa responden tidak merasa ada masalah jika harus berinteraksi dengan orang atau kelompok yang berbeda agama, selama dalam jarak sosial yang tidak terlalu masuk ke ruang privat. Tetapi, ketika ditanyakan apakah bersedia menikah dengan pemeluk agama lain, mayoritas responden menyatakan ketidaksetujuan. Ini menunjukkan bahwa jarak sosial yang ditoleransi dalam hubungan antarumat beragama baru sebatas hal-hal yang berada dalam ruang publik, tetapi ketika sudah masuk ke ranah privat, maka jarak sosial ini menyempit. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari larangan bagi pemeluk agama tertentu untuk menikah dengan pemeluk agama lainnya. Misal di kalangan Islam terdapat larangan bagi Muslimah untuk menikah dengan laki-laki non muslim. Demikian juga, dengan ajaran untuk mencari jodoh dengan melihat aspek agamanya.

Pertanyaan lain yang menarik untuk dikaji terkait dengan sikap responden yang menyatakan pernah berselisih paham dengan

orang yang berbeda agama. Kendati mayoritas (46,8%) menyatakan tidak pernah berselisih paham, tapi ada 17,2% responden yang pernah berselisih paham dengan pemeluk agama yang berbeda. Penyebabnya adalah:

1. Berbeda pendapat tentang kepercayaan;
2. Berselisih dengan etnis lain dengan membawa-bawa agama masing-masing;
3. Berselisih karena masalah pribadi, tapi membawa-bawa agama masing-masing;
4. Merasa terganggu dengan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di sekitar lingkungan permukiman.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa penyebab timbulnya perselisihan pada umumnya tidak secara langsung berkaitan dengan masalah agama, tapi karena dipicu oleh persoalan pribadi atau persoalan lain yang kemudian disangkutpautkan dengan agama. Perselisihan tersebut timbul karena prasangka sosial, yakni penilaian atas dasar stereotip tertentu terhadap individu atau kelompok yang berbeda identitasnya. Masih adanya prasangka sosial dalam hubungan antarumat beragama ini rentan menjadi pemicu konflik ketika ada ketidakpuasan dalam hubungan sosial, misalnya ketika kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh umat agama yang berbeda dirasakan mengganggu seperti menyebabkan kemacetan, maka yang kemudian dipersalahkan bukan hanya penyelenggaranya tapi juga agamanya.

### Kerja Sama antarumat Beragama

Salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur indeks kerukunan di Kota Bandung adalah kerjasama antar umat beragama/hubungan sosial. Data pada tabel di bawah ini menunjukkan secara keseluruhan sub variabel yang diukur berada pada posisi baik dan sangat baik. Namun demikian, terdapat kecenderungan fluktuasi sikap dan perilaku pada subvariabel tertentu. Misalnya subvariabel bersedia mengundang pemeluk agama lain dalam

kegiatan (misalnya kegiatan syukuran, pesta, dan lain sebagainya) yang saya lakukan (bersedia bertransaksi) memperoleh nilai baik dan sangat baik sebesar 90,7%. Sub variabel ini mendapatkan nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan sub variabel lainnya. Ini berarti dalam konteks hubungan sosial, masyarakat Kota Bandung secara umum tidak memperlakukan identitas keagamaan. Hal yang sama juga terjadi pada aspek hubungan kerja dimana sub variabel saya bersedia melakukan hubungan kerja dengan pemeluk agama lain memperoleh nilai kedua tertinggi yaitu 87,5%.

Tabel 3  
Kerjasama/Hubungan Sosial di antara Umat Beragama di Kota Bandung

Kerjasama/ Hubungan Sosial	Jawaban (%)				
	SS	S	N	TS	STS
Saya bersedia mengundang pemeluk agama lain dalam kegiatan (misalnya kegiatan syukuran, pesta, dan lain sebagainya) yang saya lakukan	33,3	57,4	7,9	0,9	0,5
Saya bersedia menghadiri undangan dari pemeluk agama lain	32,9	50,9	12,5	3,7	
Saya bersedia memberikan sumbangan kepada pemeluk agama lain yang memerlukannya	35,2	44,4	14,8	5,1	0,5
Saya bersedia melakukan hubungan kerja dengan pemeluk agama lain	35,6	51,9	11,1	0,9	0,5
Saya bersedia membantu	20,4	28,7	34,7	14,4	1,9

Kerjasama/ Hubungan Sosial	Jawaban (%)				
	SS	S	N	TS	STS
pemeluk agama lain untuk membangun rumah ibadahnya					
Saya bersedia terbuka (mengizinkan) kegiatan keagamaan lain	23,1	41,2	27,8	6,9	0,9
Saya bersedia mendengarkan saran dari tokoh agama lain	21,8	42,1	26,4	8,3	1,4

Sumber: Hasil Penelitian, diolah, 2015

Pada aspek sosial lainnya seperti kesediaan menghadiri undangan dari pemeluk agama lain dan kesediaan memberikan sumbangan kepada pemeluk agama lain mendapatkan indeks sangat baik-baik masing-masing sebesar 83,8% dan 79,6%. Ini menunjukkan adanya pola relasi sosial yang relatif aman dan setidaknya dapat menjadi modal sosial dalam membangun masyarakat Kota Bandung yang multikultural.

Subvariabel yang sedikit menjadi perhatian adalah tiga aspek yang memiliki kaitan teologis yaitu kesediaan mengizinkan kegiatan keagamaan lain sebesar 64,3%, kesediaan menerima saran dari tokoh agama lain sebesar 63,9% dan bersedia membantu pemeluk agama lain untuk membangun rumah ibadahnya 49,1%. Fluktuasi perilaku sosial yang menurun pada tiga aspek ini menunjukkan adanya kehati-hatian bagi responden untuk menjalin hubungan dalam aspek keagamaan. Bahkan pada subvariabel kesediaan membantu pembangunan rumah ibadah di beberapa wilayah mendapatkan respon negatif dari masyarakat lebih dari 16%. Artinya, sebagian masyarakat di Kota Bandung enggan untuk melibatkan diri pada kegiatan yang terkait dengan “ruang privat”

agama tertentu seperti terlibat dalam pembangunan rumah ibadah

**Sikap Pemerintah dalam Hubungan antarumat Beragama**

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006, pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah memiliki peran strategis dalam memelihara toleransi dalam umat beragama. Sub bahasan ini membahas bagaimana peran pemerintah memelihara kerukunan antarumat beragama melalui 11 indikator. Adapun rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Sikap Pemerintah Dalam Hubungan Antarumat Beragama

Sikap Pemerintah	Jawaban (%)				
	SS	S	N	TS	STS
Pemerintah memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan dengan baik	8,8	42,1	20,8	23,1	5,1
Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan dengan baik	2,8	27,8	29,6	34,3	5,6
Pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan di kota Bandung Pemerintah dengan baik	23,1	29,6	25	19,4	2,8
Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang sekarang	2,3	25	34,7	33,3	4,6

Sikap Pemerintah	Jawaban (%)				
	SS	S	N	TS	STS
berlaku sudah menjamin hak yang sama bagi setiap agama untuk membangun rumah ibadatnya					
Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang sekarang berlaku sudah diterapkan dengan konsisten bagi setiap agama	0,9	23,6	33,8	33,3	8,3
Pemerintah memfasilitasi dialog antar umat agama dengan baik	4,6	30,1	37,5	20,8	6,9
Pemerintah sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai agama	5,1	34,3	31	25,5	4,2
Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penistaan agama	14,4	38,9	25,9	14,8	6
Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama	13,4	42,1	24,1	13,4	6,9
Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama	15,3	41,2	24,5	13,4	5,6

Sikap Pemerintah	Jawaban (%)				
	SS	S	N	TS	STS
Pemerintah melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama	18,5	45,8	19,9	12	3,7

Sumber: Hasil Penelitian, diolah, 2015

Secara umum, berdasarkan jawaban responden terdapat 3 kategori utama yaitu kategori jawaban yang berada memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori setuju, netral dan tidak setuju yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Jawaban memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori setuju menunjukkan bahwa sikap pemerintah dinilai baik dalam memelihara hubungan antar umat beragama. Adapun beberapa sikap pemerintah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan dengan baik (42,1%).
2. Pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan di Kota Bandung Pemerintah dengan baik (29,6%)
3. Pemerintah sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai agama (34,3%)
4. Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penistaan agama (38,9%)
5. Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama (42,1%)
6. Pemerintah melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama (41,2%)
7. Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama (45,8%)

b. Jawaban memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori netral pada ketiga indikator di bawah ini:

1. Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang sekarang berlaku sudah menjamin hak yang sama bagi setiap agama untuk membangun rumah ibadatnya (34,7%).
2. Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang sekarang berlaku sudah diterapkan dengan konsisten bagi setiap agama (33,8%).
3. Pemerintah memfasilitasi dialog antar umat agama dengan baik (37,5%).

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 terdapat persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan khusus yang harus ditempuh masyarakat dalam pendirian rumah beribadah. Responden menyatakan netral atas prosedur perizinan yang konsisten dan terjaminnya hak yang sama bagi setiap agama dalam membangun rumah ibadah pemerintah.

Dalam perspektif ketatanegaraan, perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian dan merupakan pengecualian atas suatu larangan. Oleh karenanya prosedur yang ada harus konsisten diterapkan sehingga dapat menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara.

c. Jawaban memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori tidak setuju terdapat pada indikator kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dinilai belum melakukan sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana beribadatan dengan baik. Sosialisasi diperlukan dalam rangka menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama. Untuk itu dalam masa mendatang kegiatana sosialisasi ini perlu ditingkatkan.

### Harapan terhadap Pemerintah

Di era Reformasi, pengakuan terhadap HAM semakin menguat dan era keterbukaan diakui sebagai penciri khusus era reformasi. Sejalan dengan hal tersebut, konflik-konflik terbuka yang melibatkan umat beragama mulai muncul. Peristiwa yang paling tragis ialah konflik yang terjadi di Poso, Ambon, Sambas, Sampit dan titik-titik konflik lain di sejumlah daerah. Disinilah pentingnya kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang komprehensif untuk mendorong semakin kuatnya budaya kerukunan dan perdamaian, sekaligus meminimalisir berbagai faktor pemicu konflik.

Harapan responden terhadap pemerintah agar terciptanya kerukunan umat beragama sangat besar. Hal ini ditunjukkan melalui sebagian besar jawaban responden kuesioner yang berada dalam kategori setuju dan sangat setuju:

Tabel 5 Harapan terhadap Pemerintah Dalam Hubungan Antarumat Beragama

Harapan terhadap Pemerintah	Jawaban (%)				
	SS	S	N	TS	STS
Pemerintah perlu memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan	41,2	50	6,9	1,9	
Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan	44,4	46,8	7,9	0,9	
Pemerintah perlu memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan di kota Bandung	44	49,5	5,6	0,9	
Prosedur perizinan	43,5	50	6	0,5	

Harapan terhadap Pemerintah	Jawaban (%)				
	SS	S	N	TS	STS
pembangunan tempat ibadat perlu menjamin hak yang sama bagi setiap agama untuk membangun rumah ibadatnya					
Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat perlu diterapkan dengan konsisten bagi setiap agama	40,7	50,5	7,9	0,9	
Pemerintah perlu memfasilitasi dialog antar umat agama	41,2	44,9	12	1,4	0,5
Pemerintah perlu mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai agama	42,1	48,6	8,3	0,9	
Pemerintah perlu tegas dalam menyikapi kasus penistaan agama	41,7	50	5,6	2,3	0,5
Pemerintah perlu tegas dalam menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama	45,4	50,5	3,2	0,5	0,5
Pemerintah perlu tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama	42,6	48,1	6	2,3	0,9

Harapan terhadap Pemerintah	Jawaban (%)				
	SS	S	N	TS	STS
Pemerintah perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sampai tingkat RW	35,6	42,6	12	4,2	5,6
Pemerintah perlu memasukkan muatan kerukunan umat beragama dalam kurikulum di sekolah	37,5	38,9	17,6	2,8	3,2

Sumber: Hasil Penelitian, diolah, 2015

Harapan responden dapat diwujudkan melalui peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Pasal (1) angka (1) bahwa Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

Adapun Harapan lainnya yang teridentifikasi melalui kuesioner diluar jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut:

Tabel 6  
Harapan Pemerintah dalam Hubungan Antarumat Beragama

No	Harapan	Jumlah Responden
1	Memelihara dan meningkatkan kerukunan umat beragama agar Bandung aman dan juara	33
2	Memperhatikan agama minoritas	5

3	Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan FKUB	1
4	Sosialisasi keberadaan FKUB	1
5	Penjaminan hak-hak setiap penganut agama	1
6	Pemerintah harus mencegah dan meredam konflik antar umat beragama	3
7	Sosialisasi mengenai pemahaman toleransi antarumat beragama	2
8	Perlunya dewan antaragama	1
9	Perlu adanya layanan cepat seperti hotline untuk laporan konflik agama di Kota Bandung	1

Sumber: Hasil Penelitian, diolah, 2015

Berdasarkan tabel harapan responden terhadap hubungan antarumat beragama diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah perlu menciptakan kerukunan antarumat beragama, interumat beragama dan kerukunan antarumat beragama dan pemerintah. Kerukunan umat beragama di Kota Bandung dapat tercipta melalui upaya membangun budaya toleransi antar umat beragama. Pemerintah harus mampu membangun kesadaran atas perbedaan agama sehingga terciptanya kerukunan dan keharmonisan dalam beragama. Upaya yang dapat dilakukan melalui sosialisasi dan membangun bingkai kerukunan umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dimana salah satu tujuannya menjadikan ruang dialog antaragama khususnya dalam menyelesaikan konflik yang muncul diantara para pemangku agama.

### Indeks Toleransi Umat Beragama di Kota Bandung

Pengolahan data berdasarkan penghitungan skor untuk mengetahui indeks toleransi antarumat beragama di Kota Bandung menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7 Indeks Toleransi Antarumat Beragama di Kota Bandung

Capaian Indeks	Skor	Kategori
Indeks Persepsi	3,88	Tinggi
Indeks Sikap	3,72	Tinggi
Indeks Kerja Sama	3,96	Tinggi
Indeks Sikap Pemerintah	3,21	Cukup
Indeks Harapan terhadap Pemerintah	4,27	Sangat Tinggi
<b>Indeks Toleransi</b>	<b>3,82</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: Hasil Penelitian, diolah, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indeks untuk setiap variabel berada pada kategori “Tinggi”, kecuali untuk Indeks Sikap Pemerintah yang termasuk kategori “Cukup”. Penilaian yang tinggi untuk variabel persepsi, sikap, dan kerja sama, serta penilaian yang “Sangat Tinggi” untuk variabel harapan terhadap pemerintah menunjukkan bahwa toleransi antarumat beragama di Kota Bandung berada pada kondisi yang baik. Masih terdapat penilaian yang cenderung negatif terkait dengan aktivitas keberagamaan yang dianggap dapat mengganggu ranah pribadi responden. Hal ini justru menjadi tugas Pemerintah Kota Bandung untuk dapat mengatur interaksi antarumat beragama dengan lebih baik, terutama untuk meminimalkan gangguan-gangguan ke dalam ranah pribadi tersebut.

Indeks sikap pemerintah yang termasuk kategori “Cukup” mengindikasikan bahwa pemerintah belum berperan optimal dalam hal sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan serta prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang berlaku. Penerapan aturan-aturan perizinan pembangunan rumah ibadat juga dinilai belum cukup optimal untuk menjamin hak yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk membangun rumah ibadatnya. Hal ini dikuatkan dengan data penilaian responden untuk kedua hal tersebut yang sebagian besar responden menilai tidak setuju untuk

pernyataan bahwa pemerintah telah mensosialisasikan dengan baik aturan perizinan pembangunan rumah ibadat, serta penilaian netral untuk pernyataan bahwa prosedur perizinan sudah menjamin hak yang sama bagi setiap agama untuk mendirikan rumah ibadatnya.

Persoalan perizinan pembangunan rumah ibadat selama ini dinilai oleh responden sebagai penyebab utama munculnya konflik antarumat beragama. Sementara, ranah perizinan berada dalam kewenangan pemerintah. Hal ini berarti bahwa ada persoalan regulasi yang juga perlu dibenahi oleh pemerintah agar interaksi antarumat beragama tidak mengarah pada munculnya penilaian negatif ketika ada rencana pembangunan rumah ibadat agama lain di lingkungan permukiman. Isu tentang perizinan sangat rentan dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga kepastian regulasi dan prosedur perizinan perlu disosialisasikan dan diberlakukan secara tegas oleh pemerintah tanpa membeda-bedakan agama.

Secara keseluruhan, Indeks Toleransi antarumat Beragama di Kota Bandung menunjukkan kategori “Tinggi”, yakni berada pada nilai 3,82. Capaian ini menunjukkan bahwa persepsi, sikap, dan kerja sama dalam interaksi sosial antarumat beragama di Kota Bandung sudah berlangsung secara kondusif. Jarak sosial yang ada masih tergolong wajar karena kecenderungan penolakan terhadap pemeluk agama berbeda hanya berkaitan dengan ranah yang sangat pribadi atau berkaitan dengan identitas *in-group* dari suatu pemeluk agama. Dalam hal interaksi sosial lainnya, ada keterbukaan untuk menerima dan bergaul dengan pemeluk agama yang berbeda.

Kecendeungan tingginya toleransi antarumat beragama di Kota Bandung agaknya dilatarbelakangi oleh kuatnya ‘tarikan’

kehidupan urban yang memiliki kemampuan untuk 'memaksa' individu menjadi lebih rasional di satu sisi serta 'endapan' nilai-nilai tradisi yang tidak dapat hilang sepenuhnya di sisi lain. Hal ini cukup menjelaskan kenyataan bahwa toleransi antar umat beragama di Kota Bandung dalam hubungannya dengan relasi sosial, seperti berteman dan bertetangga lebih tinggi dibandingkan dengan relasi-relasi yang lebih privat - seperti anggota keluarga yang menikah dengan orang lain yang beda agama. Masyarakat Kota Bandung juga merasa keberatan jika di dekat tempat tinggalnya terdapat rumah ibadah dari umat agama lain. Namun demikian, sikap rasional masyarakat kota menjadikan permalihan pendirian rumah ibadah ini tidak menimbulkan kekerasan antar umat beragama. Pemerintahlah yang kemudian sangat diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan toleransi antar umat beragama.

### Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Indeks Toleransi antarumat Beragama di Kota Bandung sebesar 3,82 termasuk dalam kategori "Tinggi", yang mengindikasikan bahwa interaksi sosial antarumat beragama di Kota Bandung telah berlangsung secara baik dan berada dalam batas-batas jarak sosial yang wajar. Mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan terkait dengan toleransi antarumat beragama, sebagaimana tercermin juga dalam sikap antarumat beragama yang bersedia menerima secara terbuka keberadaan pemeluk agama yang berbeda dalam ranah pergaulan sosial maupun profesi, meskipun sebatas pada dimensi publik atau formal dari pergaulan sosial.

Kemungkinan konflik umumnya dipicu oleh perizinan pembangunan rumah ibadah yang berada dalam ranah kewenangan pemerintah, sehingga hal ini penting untuk dibenahi dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Toleransi di Kota Bandung. Isu agama masih menjadi faktor kuat untuk memicu sentimen berbasis identitas *in-group* dan *out-group*, sehingga rentan memicu konflik.

Pemerintah Kota Bandung justru perlu meningkatkan perannya dalam meminimalkan resiko konflik yang dipicu oleh sentimen keagamaan tersebut. Mayoritas responden berharap pemerintah berperan lebih banyak dan lebih substantif dalam hal regulasi kehidupan umat beragama, memenuhi jaminan hak beragama, serta dalam hal penciptaan situasi toleransi yang kondusif, seperti melalui penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendidikan multikultural. Pemerintah juga diharapkan lebih tegas, konsisten, dan adil terhadap semua pemeluk agama dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan perizinan pembangunan rumah ibadah dan penerapan peraturan-peraturan tersebut.

### Saran-saran

Untuk meningkatkan kehidupan umat beragama yang lebih toleran demi tercapainya Bandung Juara, disarankan untuk melakukan sejumlah hal sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu berperan lebih optimal dalam hal sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan serta prosedur perizinan pembangunan tempat ibadah yang berlaku.
2. Penerapan aturan-aturan perizinan pembangunan rumah ibadah juga perlu lebih konsisten dengan tidak diskriminatif
3. Pemerintah perlu lebih banyak mensosialisasikan aturan perizinan

- pembangunan rumah ibadat, sehingga ada kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat
4. Persoalan perizinan pembangunan rumah ibadat selama ini dinilai oleh responden sebagai penyebab utama munculnya konflik antarumat beragama. Sementara, ranah perizinan berada dalam kewenangan pemerintah. Hal ini berarti bahwa ada persoalan regulasi yang juga perlu dibenahi oleh pemerintah agar interaksi antarumat beragama tidak mengarah pada munculnya penilaian negatif ketika ada rencana pembangunan rumah ibadat agama lain di lingkungan permukiman.
  5. Isu tentang perizinan sangat rentan dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga kepastian regulasi dan prosedur perizinan perlu disosialisasikan dan diberlakukan secara tegas oleh pemerintah tanpa membedakan agama.
  6. Untuk merespon masukan responden yang mengatakan harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju tempat ibadatnya, Pemerintah Kota dapat memfasilitasi pembangunan rumah-rumah ibadat yang mewakili agama-agama yang diakui resmi oleh negara, selain Islam (Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu) di tiap kecamatan, sehingga jika ada pemeluk agama tersebut yang bermukim di kecamatan tersebut tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk dapat beribadat serta tidak perlu menyelenggarakan kegiatan peribadatan di rumah-rumah yang dapat mengganggu lingkungan sekitarnya.
  7. Dalam rangka meminimalkan prasangka sosial, perlu ditumbuhkan kembali nilai-nilai sosial di masyarakat, seperti gotong royong, silih kirim makanan ketika perayaan hari-hari keagamaan, dan sejenisnya, sehingga ada interaksi sosial yang lebih akrab antarmasyarakat.
  8. Perlu pengkajian lebih lanjut tentang potensi konflik internal di antara umat beragama yang sama, untuk meminimalkan keresahan yang muncul akibat berkembangnya aliran atau sekte-sekte tertentu dalam agama tertentu.
  9. Perlu dibentuk FKUB hingga tingkat komunitas (RT/RW) sebagai instrumen deteksi dini konflik intra atau antarumat beragama, yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan aparat pemerintah, kepolisian, dan tokoh masyarakat setempat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Haidlor Ali. (2013). *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Allport, Gordon. (1954). *The Nature of Prejudice*. Cambridge, MA: Addison Wesley
- Baron, Robert A dan Donn Byrne. (2004). *Psikologi Sosial*. Edisi kesepuluh Jilid 1. Jakarta : Erlangga.
- Bogardus, Emory S. (1925). "Social Distance in the City". *Proceedings and Publications of the American Sociological Society*. Volume 20, hal. 40–46.
- Dayakisni, Tri dan Hudainah. (2006). *Psikologi Sosial*. Malang : UMM Press.
- Faridah, Ika Fatmawati. (2013). Toleransi Antar Umat Bergama Masyarakat Perumahan. *Jurnal Komunitas* 5(1): 14-25. [<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>].
- Karwadi. (2004). Motivasi Beragama Secara Toleran Masyarakat Dusun Sorowajan Banguntapan Bantul Yogyakarta. *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol.V(1): 1-16.
- Lay, Cornelis. (2009). Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 13(1):1-19.
- Nisvilyah, Lely. (2003). Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Memperkokoh Persatuan Kesatuan Bangsa( Studi Kasus Umat Islam dan Kristen Dusun Segaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten

- Mojekerto). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, (1):383-396.
- Nurhayati, Indah. (2011). *Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus Tentang Perayaan Hari Besar Umat Beragama Islam dan Agama Kong Hu Chu Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang)*. Semarang: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Powell, Russell dan Steve Clarke. (2002). "Religion, Tolerance and Intolerance: Views from Across the Disciplines". Diunduh dari [http://www.philosophy.ox.ac.uk/\\_\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0013/13504/Tolerance5\\_background\\_reading.pdf](http://www.philosophy.ox.ac.uk/___data/assets/pdf_file/0013/13504/Tolerance5_background_reading.pdf), pada 9 September 2015.
- Radjab, Budi. (2006). Kota Bandung yang Majemuk. *Pikiran Rakyat*, 15 Juli.
- Risdianto, Hery. (2008). *Kerukunan Umat Beragama (Studi Hubungan Pemeluk Buddha dan Islam di desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kab Kulon Progo)*. Yogyakarta: Skripsi Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Setara Institute. (2010). *Toleransi Sosial Masyarakat Perkotaan*. Jakarta: SETARA Institute.
- Sternberg, Robert J. (2001). *Psychology: Search of The Human Mind*. Third Edition. Harcourt College Publisher. USA.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Prasangka Sosial*. [Online]. Diunduh dari <http://library.usu.ac.id/download/fisip/kesos-irmawati3.pdf> (12 Desember 2008).
- Suryana, Toto. (2011). Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Ta'lim Volume 9. (2):127-136.